

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. UII Press, Yogyakarta.
- Andi Junianto, 2007. *Notaris dan Protokol Notaris*, Eresco, Bandung.
- Anke Dwi Saputro, 2010, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Gramedia Pustaka.
- Arief Sidharta, 2008, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Bahder Johan Nasution, 2014, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Eka Sumarningsih. 2012. *Peraturan Jabatan Notaris*. Semarang:Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta. Erlangga. hlm. 3.
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 20019, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2011. *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Umum hukum dan Negara, dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Alih Bahasa oleh Somardi), Media Indonesia, Jakarta.
- Herlina Effendie, 2013, *Notaris Sebagai Pejabat Publik Dan Profesi*, Pustaka Ilmu, Jakarta.

- Ira Koesomawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Kenotarian Raih Asa Sukes*, Jakarta.
- Jimlly Asshidiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Laurensius Arliman. 2015. *Notarius dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2010, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oemar Moechthar, 2017. *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 58.
- Arief Sidharta, 2008, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ryanto Pareno. 2006. *Hak-Hak Khusus Notaris Sebagai Pejabat Publik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Eresco, Bandung.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, hlm. 73-79.
- Sri Mamudji, 2007, *Metode penelitian dan Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Tuti Irawati, , 2010. *Analisa Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana*, Universitas Indonesia.

Jurnal

Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Lex Jurnalica* Vol. 12 No. 3, 2015.

Endah Sumiarti. 2015. Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Ditinjau Dalam Perspektif Perlindungan Jabatan Notaris dan Kepentingan Umum. *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume 1, Nomor 2.

Giovanni Karilla Ayu, 2020, Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Akta Notaris Atas Pencabutan Sertifikat Hak Milik, *Jurnal Notary Indonesian* Vol. 2 No.3, hlm 268.

Lentra Nugraha, 2020, Pembuatan Salinan Akta Berdasarkan Protokol Notaris Werda yang Telah Diserahkan Pada Notaris Pemegang Protokol, *Jurnal Lex Renaissance* No.2, Vol.5.

Melita Trisnawati, 2019. Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang telah Meninggal, *Jurnal Notarius*, Volume 12, Nomor 1.

M. Syahrul Borman, 2019, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3 Nomor 1.

Nur Aishah. 2018. Tanggung Jawab Notaris Setelah berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh/Dihadapannya. UII.

Mardiyah, 2017, Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 1.

- Muriel Cattleya Maramis, Tata Cara Pemanggilan Notaris untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya. *Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012*.
- Rahmad Hendra, 2012, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekan Baru. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3.
- Rafly Dzikry Abida, 2021, Tanggung jawab Notaris Terhadap Waarmerking Akta Di Bawah Tangan Yang Pembuatannya Dibantu Oleh Notaris. *Jurnal Education Development*, Vol. 9 No. 1. Universitas Airlangga.
- Rio Utomo Hably & Gunawan Djajaputra, 2019, Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nmor: 1003 K/PID/2015), *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2 Nomor 2.
- Sony Nurul Akhmad, 2019, Kekuatan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3 No. 1.
- Yofi Permana, 2019, Pengaturan penyerahan Protokol Notaris Yang telah Meninggal Dunia Dan Praktiknya di Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 5. No.1.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris